



ISSN 2685-483X
Volume 1, Issue 1, Januari-Juni 2019
Halaman 1-16



Perlawanan Gerakan Guru Pasca Orde Baru di Indonesia: Studi Pada Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)

Afdhal

Program Magister Sosiologi Universitas Indonesia

Rakhmat Hidayat

Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Jakarta

Kata Kunci	Abstrak
Gerakan Sosial	<p>Penelitian ini berangkat dari fenomena menjamurnya gerakan guru pasca jatuhnya rezim Orde Baru. Guru yang tergabung dalam serikat guru memperjuangkan kualitas pendidikan dan keadilan sosial dalam pendidikan. Salah satu serikat guru yang fokus terhadap misi tersebut adalah Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Tujuan dari penelitian ini ialah menjabarkan bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh FSGI dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan mengombinasikan beberapa metode pengumpulan data, yakni observasi, wawancara mendalam, dan survey. Sementara itu, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan yang dilakukan oleh FSGI didorong dua hal, yaitu perubahan struktur peluang politik (political opportunity structure) secara eksternal dan proses reproduksi sumber daya gerakan (resource mobilization) secara internal. Perubahan struktur politik di Indonesia terlihat sejak munculnya kebebasan berorganisasi yang tertuang dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Adapun peran FSGI adalah mereproduksi sumber daya gerakan dengan sumber daya material dan jaringan yang kuat terhadap organisasi lainnya. Kedua hal inilah yang menggiring FSGI dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan di Indonesia.</p>
Gerakan Guru	
Kualitas Pendidikan	
Keadilan Sosial	
Diterima	9 Mei 2019
Review	23 Juni 2019
Revisi	25 Juni 2019
Penerimaan	25 Juni 2019
Copyedit	25-28 Juni 2019
Publikasi	30 Juni 2019



ISSN 2685-483X
Volume 1, Issue 1, Januari-Juni 2019
Pages 1-16



Resistance of the Teacher Movement after the Soeharto's Era in Indonesia: Study of the Indonesian Teachers Union Federation (FSGI)

Afdhal

Program Magister Sosiologi Universitas Indonesia

Rakhmat Hidayat

Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Jakarta

Keywords	Abstract
Social Movement Teacher Movement Quality of Education Social Justice	This research departs from the phenomenon of the teacher movements that is growing after the Orde Baru regime fall. Teachers who are members of teacher unions fight for the quality of education and social justice in education. One of the teacher unions that focused on the mission was the Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). The purpose of this study is to describe how the struggle carried out by FSGI in realizing quality and equitable education. This study uses a qualitative research approach by combining several methods of data collection, observation, in-depth interviews, and surveys. Meanwhile, the results of this study indicate that the movement carried out by FSGI was driven by two things, the political opportunity structure and the process of reproducing the movement of resources (resource mobilization). The changes of political structure in Indonesia have been seen since the emergence of freedom of organization as stated in UU No. 14 of 2005 concerning teachers and lecturers. The role of FSGI is to reproduce movement resources with material resources and a strong network of other organizations. These two things led FSGI to realize a quality and fair education in Indonesia.
Submission	9 Mei 2019
Review	23 Juni 2019
Revision	25 Juni 2019
Acceptance	25 Juni 2019
Copyediting	25-28 Juni 2019
Publication	30 Juni 2019

Acknowledgement

The authors state their deepest gratitude toward Mr. Ricardi S. Adnan for his constructive criticism as well as feedbacks that support this writing. In addition, the authors convey their gratitude to FSGI, Mr. Heru Purnomo, Mr. Satriwan Salim, Mr. Eka Ilham and Mr. Fahriza Tanjung for their readiness to express their view in studying the FSGI movement. In conclusion, the authors convey their greatitude to Mr. Haji Ubay as the newsperson focusing on education issues for his constructive feedbacks to this writing.

Ucapan Terima Kasih/Pengakuan

Penulis mengucapkan terima kasih terhadap bapak Ricardi S Adnan yang telah banyak memkritisi penulisan dan sekaligus memberikan masukan-masukan yang membangun tulisan ini. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada FSGI, Pak Heru Purnomo, Pak Satriwan Salim, Pak Eka Ilham, dan Pak Fahriza Tanjung yang telah bersedia untuk dimintai dimintai keterangan dalam mengkaji gerakan FSGI tersebut. Selain itu terima kasih juga kepada Pak Haji Ubay sebagai wartawan yang fokus pada isu-isu pendidikan yang telah memberikan banyak masukan juga terhadap tulisan ini.

Pendahuluan

Terdapat beberapa pola dalam kajian gerakan guru, yang menyebabkan gerakan guru muncul dan berkembang. *Pertama*, militerisme dan Represivitas Pemerintah. Militerisme merupakan upaya pemerintah dalam menggunakan kekuatan militer dalam mencapai tujuan untuk menjamin keamanan dan pembangunan nasional. Bacevich & Andrew (2005) menyebutkan bahwa militerisme bukan hanya sekedar kehadiran lembaga perang, tetapi juga seperangkat nilai yang berakar pada kekerasan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat sipil.

Beberapa literatur menyebutkan bahwa militerisasi dan represivitas pemerintah menjadi penyebab gerakan serikat guru muncul. Synott, (2001; 2002; 2002; 2007) membahas tentang bagaimana serikat guru yang terus menentang pemerintah dalam perjuangan mewujudkan demokratisasi pendidikan di Korea Selatan yang memiliki visi Pendidikan Sejati (*Truth Education*) di sekolah-sekolah Korea. Pendidikan Sejati maksudnya adalah sistem pendidikan yang bebas, terlepas dari tekanan pemerintah, dan melindungi hak-hak masyarakat pendidikan.

Di Meksiko, Lemus (2015) menjelaskan bahwa gerakan guru muncul terjadi karena tiga hal utama, yakni (1) liberalisasi pendidikan dengan mengubah konstitusi yang mengarah pada ekonomi pasar dan mempercepat privatisasi pendidikan, (2) otoritarianisme dan militerisasi yang dilakukan oleh pemerintah ketika adanya aksi protes terhadap kebijakan liberalisasi pendidikan, (3) tindakan lintas batas, munculnya solidaritas dari koalisi Trinasional yang berupaya menentang liberalisasi pendidikan.

Di Amerika Latin (Brazil, Bolivia, Chili, Venezuela, dan Guatemala), guru-guru yang tergabung dalam organisasi profesi melakukan gerakan sosial dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Guru ikut bergabung dan menyebarkan sistem-meningkatkan (*system-enhancing*) dalam konteks gerakan sosial masyarakat yang arahnya pada demokratisasi pendidikan dan hak adat (Finger & Gindin, 2015).

Kedua, kesenjangan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial. Kasus gerakan guru yang terjadi di Uganda ialah guru melakukan gerakan protes terhadap pemerintah lantaran guru yang dibayar secara tidak adil. Gaji yang diberikan kepada guru belum cukup untuk kesejahteraan guru (Namara & Kasaija, 2016). Tiga hal yang menjadi isu kolektif yang terjadi di Uganda adalah permasalahan gaji, perumahan, dan sistem keadilan sosial. Hal ini senada juga yang disampaikan Kaur (2012) bahwa ketidakadilan dalam dunia pendidikan dengan sendirinya akan menghadirkan gerakan guru untuk menuntut tercapainya suatu keadilan sosial.

Studi yang dilakukan oleh Lund (2001) di Kanada menunjukkan aktivisme guru terjadi tidak hanya karena isu keadilan sosial semata, tetapi isu ras, kelas, jenis kelamin, dan

orientasi seksual juga meningkatkan gerakan guru. Rottman (2013:81) menegaskan bahwa ketidakadilan sosial yang terjadi di dunia pendidikan dan terhadap guru sendiri akan meningkatkan representasi guru dan keterlibatan anggota serikat guru dalam melawan kapitalis, kebijakan neoliberal, demokratisasi prosedural, dan mewujudkan keadilan sosial. Senada pula dengan Picower (2012) yang menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam dunia pendidikan akan mengeksplorasi peran aktivisme guru. Permasalahan keadilan sosial menjadi basis sebuah gerakan seperti gerakan buruh yang terjadi di Afrika Selatan misalnya, yang dituntutnya adalah keadilan sosial (Matthews, 2015). Atau gerakan buruh yang terjadi di Brazil dan Filipina, keadilan sosial sebagai faktor dalam munculnya fenomena gerakan sosial (Scipes, 2014).

Begitu pula dengan gerakan guru, yang salah satu faktor dasar dari gerakannya adalah keadilan sosial. Namun ini juga tidak terlepas dari sejumlah kritik, ketika guru kesejahteraan guru telah hampir tercapai, profesionalitas guru masih belum terjamin. Artinya bahwa antara kesejahteraan dan profesionalitas harus seimbang. Guru tidak hanya cukup untuk menuntut kesejahteraan terhadap pemerintah, tetapi dilain pihak profesionalitasnya masih diragukan (Namara & Kasaija, 2016). Hal ini senada dengan Rizali, Sidi & Dharma (2009) bahwa dalam pendidikan, mutu guru sebagai kunci dalam pendidikan, ketimbang kurikulumnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa mutu guru ini dapat ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun organisasi guru.

Konsep Gerakan Sosial: Gerakan Sumber Daya dan Struktur Peluang Politik

Asumsi utama dari teori Gerakan Sumber Daya (*Resource Mobilization Theory*) adalah masalah dan ketegangan sosial sebagai suatu yang melekat dalam masyarakat. Oleh karena itu, gerakan sosial tergantung pada kekuatan dan kemampuan dalam memobilisasi sumber daya yang ada untuk merespons masalah sosial (Porta & Diani, 2006). Jenkins (1983) menyebutkan bahwa teori ini merupakan model pembentukan gerakan sosial yang banyak faktor lebih maju, menekankan sumber daya, peluang politik, di samping hipotesis ketidakpuasan terhadap teori tindakan kolektif. Dengan kata lain, teori ini hadir sebagai kritikan terhadap teori perilaku kolektif yang memosisikan gerakan sosial sebagai tindakan yang irasional. Sebaliknya, menurut teori gerakan sumber daya ini gerakan sosial justru sebagai tindakan yang rasional.

McCharty dan Zald (1977) mengatakan bahwa teori gerakan sumber daya ini memosisikan organisasi- organisasi gerakan memberikan struktur mobilisasi yang sangat krusial bagi aksi kolektif dalam bentuk apa pun. Lebih lanjut, menurutnya ketidakpuasan bukan berarti selalu mendorong terjadinya aksi kolektif, tetapi aksi kolektif ini sebagai cara dan sarana untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, teori ini dipengaruhi oleh pendekatan Olsonian yang menyatakan bahwa dalam sudut pandang rasional hanya ada sedikit alasan bagi individu untuk terlibat dalam aksi kolektif (Jenkins, 1983). Semakin besar kemungkinan perilaku untuk membuahkan hasil yang spesifik, maka semakin besar pula kemungkinannya untuk melakukan perilaku atau aksi sosial tersebut. Tidak mengherankan jika teori ini menggunakan analisis untung-rugi (Klandermans, 2005).

Lebih lanjut lagi, Klandermans (2005) mengatakan bahwa organisasi sebagai roda penggerak dalam aksi sosial mempunyai fungsi yang strategis. Fungsi tersebut antara lain sebagai konstruksi dan rekonstruksi keyakinan kolektif, mentransformasikan ketidakpuasan ke dalam aksi kolektif, dan mempertahankan komitmen terhadap gerakan. Gerakan sosial muncul sebagai akibat bersatunya para aktor gerakan dalam cara yang rasional, mengikuti segala kepentingan mereka, dan adanya peran sentral organisasi serta para pemimpin yang "profesional" untuk memobilisasi sumber daya yang ada pada mereka. Dengan kata lain, kekuatan gerakan ini terletak pada seberapa besarnya sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya material maupun sumber daya non-material. Sumber daya material mencakup usaha, uang, keuntungan konkret, dan jasa. Selain itu, sumber daya non-material mencakup otoritas, pertalian moral, kepercayaan dan persahabatan (Porta & Diani, 2006), termasuk juga partisipan dana, publikasi media, serta dukungan opini publik dan elite (Halcli, 2000).

Selanjutnya, teori struktur peluang politik hampir mirip dengan teori gerakan sumber daya, yakni sama-sama mengedepankan aspek rasionalitasnya. Namun, perbedaannya adalah teori ini tidak lagi terfokus pada kehidupan internal organisasi gerakan, tetapi memberikan perhatian yang lebih sistematis terhadap lingkungan politik dan institusi tempat gerakan tersebut berlangsung (Porta & Diani, 2006). Fokus utama dari teori ini adalah relasi antara pelaku institusi politik dan para aktor gerakan sosial. Maju dan mundurnya suatu gerakan sosial terletak pada peluang dan hambatan dalam sistem politik tertentu (Porta & Diani, 2006). Dimensi yang penting dalam teori ini adalah keterbukaan atau tertutupnya negara terhadap masukan dari aktor yang tidak mapan (*non-established actor*) dan kuat atau lemahnya kapasitas aktor politik atau negara dalam mengimplementasikan secara efektif kebijakan yang diputuskan (Kitschelt, 1986).

Senada dengan Tarrow (1998) yang mengatakan bahwa dimensi penting dalam peluang politik adalah (1) tingkat keterbukaan atau tertutupnya sistem politik yang terinstitusionalisasi; (2) stabilitas dan instabilitas elite politik yang luas, yang secara tipikal menyiapkan sebuah pemerintahan; (3) ada atau tidaknya pengelompokan elite; dan (4) kapasitas negara yang cenderung untuk menindas. Dengan kata lain, keberhasilan dari gerakan sosial ditentukan oleh struktur peluang dan hambatan dalam sistem politik yang lebih luas.

Secara sederhana, teori ini memandang lingkungan eksternal sangat mempengaruhi gerakan sosial. Ketika negara memberikan konfigurasi politik yang terbuka, maka elemen-elemen gerakan sosial akan memperoleh keleluasaan dalam mengembangkan dirinya. Sebaliknya ketika negara tertutup dan represif terhadap gerakan, maka gerakan sosial akan berjalan lambat. Namun tidak tertutup kemungkinan kondisi seperti ini akan melahirkan gerakan-gerakan tersembunyi, kekerasan yang brutal, pemberontakan, dan radikalisme. Kondisi seperti ini serupa dengan teori yang disampaikan oleh Peter Eisinger pada tahun 1973 yang melihat konteks kerusuhan sosial di kota-kota Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Di sana, ketika kota dengan sistem politiknya yang terbuka, kerusuhan cenderung lebih sedikit dengan struktur politiknya yang tertutup (Meyer, 2004).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sebagai metode dalam penelitian. Studi ini berupaya mendeskripsikan tentang fenomena menjamurnya aktivisme guru pasca jatuhnya Orde Baru di Indonesia dengan kasus organisasi guru Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Studi ini juga akan menggali lebih dalam perkembangan dalam gerakan guru. Penelitian ini bersifat induktif, karena penelitian ini berupaya mengabstraksikan dan menemukan pola-pola umum dari data-data khusus. Studi ini termasuk dalam *case study research* karena terfokus pada pengumpulan data dengan hanya menggunakan satu atau dua unit analisis pada kasus-kasus tertentu. Secara khusus studi ini melihat kasus menjamurnya gerakan guru di Indonesia dengan studi kasus pada organisasi Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).

Unit analisis studi ini terfokus pada gerakan guru yang diaktualkan oleh organisasi Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Alasan utama peneliti dalam memilih organisasi ini adalah pertama, FSGI merupakan salah satu organisasi guru independen yang sangat aktif dalam melakukan gerakan sosial pada dunia pendidikan. Kedua, jaringan guru dan anggota dari FSGI ini telah tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Ketiga, argumentasi-argumentasi dari FSGI menjadi arus utama media massa terkait isu-isu pendidikan di Indonesia.

Pada studi ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, dan observasi. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan cara memperoleh data melalui tanya jawab antara peneliti dengan informan. Peneliti dalam mewawancarai menggunakan instrumen atau pedoman penelitian. Tujuan menggunakan pedoman tersebut supaya data yang didapatkan tidak melenceng ke mana-mana, sehingga dapat menghemat waktu. Selain wawancara mendalam, observasi pun menjadi teknik yang akan peneliti lakukan dalam studi ini. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung bagaimana fenomena atau kasus yang diteliti. Observasi ini juga akan membantu peneliti

dalam mendeskripsikan lingkungan sosial dan lingkungan alam para informan.

Dalam mengolah data, Creswell (2002) menyebutkan ada beberapa tahap yang dapat dilakukan oleh peneliti. Pertama, transkrip hasil wawancara. Pada transkrip ini yang hal yang penting dilakukan adalah menuliskan informasi secara yang didapatkan secara lisan menjadi tulisan menggunakan catatan lapangan (*field notes*) sebagai pelengkap dari data hasil transkrip. Kedua, membaca data dari hasil yang ditranskripsi secara keseluruhan dan memilah-milah data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Ketiga, tahap yang akan peneliti lakukan adalah pengkodean (*coding*) dan pengkategorisasian terhadap data-data yang dinilai sesuai dengan penelitian. Setelah peneliti selesai melakukan pengkodean, maka terakhir yang akan peneliti lakukan adalah menganalisisnya dan kembali pada pertanyaan penelitian dan argumentasi penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Kemudian peneliti menarik kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

Sekilas tentang Organisasi Guru dan Sejarah Gerakan Guru di Indonesia

Sejarah gerakan guru di Indonesia mempunyai akar yang panjang. Gerakan ini tercatat dari sebelum kolonial Belanda masuk hingga hari ini. Sebelum kolonial Belanda menjajah Indonesia, koloni Portugis dan Inggris telah lebih dulu menjajah Indonesia. Penjajahan ini diiringi oleh penyebaran agama Kristen oleh misionaris- misionaris Portugis. Supriadi (2003) mengatakan bahwa orang-orang Portugis pertama kali mendirikan sekolah di Ambon pada tahun 1536. Pada era ini organisasi guru dan gerakan guru telah terbentuk. Arah gerakan guru adalah mengemban misi penyebaran agama Katolik Ordo Jesuit dan Dominika. Oleh karena itu, masa ini gerakan guru disebut sebagai gerakan Ordo Jesuit dan Dominika. Pada masa ini pula pendidikan agama Katolik sangat kuat sebagai basis pendidikan. Setelah Portugis berhasil dikalahkan oleh Inggris, pendidikan guru dan gerakan guru menjadi tidak terorganisir kembali. Pada masa kolonial Inggris, Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur jendral Hindia Belanda yang memfokuskan penelitian tentang Jawa.

Gerakan guru yang lebih progresif muncul sejak pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini terjadi karena ditopang oleh pembentukan organisasi-organisasi guru yang memperjuangkan kesejahteraan untuk guru, terutama guru pribumi. Gaji guru pada masa itu dapat dikatakan besar, namun tetap saja adanya perbedaan yang mencolok antara gaji guru pribumi dengan gaji guru Eropa. Hal inilah yang mendorong Bumiputera untuk mendirikan organisasi guru yang bertujuan untuk memperjuangkan nasib dan hak-hak guru. Dwidjosewojo adalah salah satu aktor penggerak yang mendirikan Perserikatan Guru Hindia Belanda (PGHB) pada akhir tahun 1911 (Sutamto, 1992).

Dalam perjalanannya, pada tahun 1919 PGHB pecah dengan bermunculan organisasi-organisasi guru berdasarkan latar belakang pendidikan, pangkat dan status yang berbeda. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi sosial politik yang semakin mempersulit guru untuk bersatu. Tidak berhenti sampai di sini, PGHB pada tahun 1930-an kemudian menggabungkan dirinya dengan Persatuan *Vakbonden* Pegawai Negeri (PVPN) sebagai usaha untuk terus memperjuangkan nasib para guru yang masih menjadi anggotanya. PVPN merupakan organisasi pegawai negeri yang terlepas dari pengaruh politik praktis dan partai-partai politik. Ia pun tidak mempunyai tujuan politik. Dengan bergabungnya PGHB dengan PVPN menjadikan organisasi ini lebih progresif. Seiring dengan diberlakukan peraturan baru tentang serikat pekerja pegawai negeri yang menyebabkan PGHB mengubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) pada tahun 1933.

Setelah masa pendudukan Belanda di Indonesia, sejarah gerakan guru memasuki babak baru yakni masa pemerintah Jepang. Pada masa itu, pendidikan formal berkembang pesat. Pemerintah Jepang pun menerapkan kebijakan pendidikan dengan pendidikan untuk kebutuhan perang. Dibentuk pula sekolah guru sebagai persiapan guru untuk mengajar. Bagi Jepang sendiri, makna guru sangat penting dalam penjajahannya. Mereka

memosisikan guru sebagai orang yang sangat dihormati. Sang guru mendapat kehormatan dengan julukan Sensei. Maka tidak heran jika kedudukan guru masa Jepang lebih terpandang secara jabatan ketimbang moral (Tilaar, 1998).

Lantas, bagaimana dengan organisasi guru pada masa Jepang jika guru telah mendapatkan kesejahteraan dan kehormatan secara moral? Apakah yang mereka perjuangkan? Memang pada kenyataannya pada pemerintahan Jepang gerakan guru dapat dikatakan kurang progresif. Ada beberapa alasan, pertama, pemerintah Jepang melarang segala bentuk pergerakan politik di Indonesia. Jika ada, pergerakan tersebut harus ditujukan pada usaha kemenangan perang Jepang. Kedua, alasan kesejahteraan sebagai basis perjuangan guru sejak masa kolonial Belanda telah tercapai pada masa Jepang. Seperti peneliti katakan sebelumnya bahwa kesejahteraan guru, baik secara ekonomi dan moral telah tercapai pada masa Jepang. Dua hal inilah yang menyebabkan gerakan guru dikatakan kurang progresif pada masa pendudukan Jepang.

Setelah masa penjajahan Jepang usai, lahirlah kemerdekaan yang menjadi modal utama dalam gerak guru untuk pendidikan Indonesia. Para guru menyadari bahwa semangat kemerdekaan ini menjadi dasar dalam memperjuangkan pendidikan Indonesia dan menciptakan organisasi guru yang benar-benar bertujuan untuk kemaslahatan pendidikan. Tepatnya 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan, dengan semangat dan cita-cita yang sama dari para guru, maka diadakan kongres guru di Surakarta pada tanggal 24-25 November 1945. Kongres yang dipimpin oleh para tokoh pendidik, seperti Amin Singgih, Rh. Koesnan, dan kawan-kawan melahirkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pada masa itu semua organisasi guru bersatu untuk melebur dalam wadah PGRI. Mereka sepakat untuk menciptakan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan memperkuat berdirinya Republik Indonesia (Supriadi, 2003).

Pada awal berdirinya PGRI, tiga hal yang menjadi semangat perjuangannya adalah mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan, dan membela hak-hak guru. Akan tetapi, arah lanjutan perjuangan PGRI sedikit menyimpang ketika memasuki era pemerintahan Orde Baru. Pada masa ini guru dijadikan sebagai komoditas politik kekuasaan. Pada masa ini dikatakan bahwa semua organisasi profesi bersandar pada kekuasaan supaya eksistensinya diakui dan mendapatkan legitimasi. Namun kenyataannya adalah oknum ini hanya mendapatkan legitimasi semu, artinya organisasi pengurus bukan berasal dari internal mereka sendiri. Misalnya PGRI ini diketuai bukan berasal dari kalangan guru, tetapi kalangan elit politik atau instansi pemerintah.

Pasca orde baru, ruang politik terbuka lebar bagi gerakan-gerakan alternatif di Indonesia, termasuk gerakan guru. Pada kalangan guru, loyalitas tunggal terhadap PGRI tidak terjadi lagi. Organisasi-organisasi guru bermunculan, seperti Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) yang berlangsung sejak tahun 1998. Di lain pihak, PGRI sendiri pun memperbaiki dan mereposisi dirinya kembali sebagai organisasi yang kritis terhadap pemerintah, tetapi tetap menyatakan sebagai partner kerja pemerintah. Pada prosesnya ini pula, pasca orde baru dengan munculnya UU Guru dan Dosen yang menyebabkan gerakan guru semakin masif dan terspesialisasi masing-masing. Hingga saat ini, telah tercatat lebih dari 100 organisasi guru yang berkembang setelah reformasi (Farisi, 2013). Tidak terkecuali, organisasi FSGI pun hadir karena konteks sosial politik yang sama.

Eksistensi FSGI sejak Berdiri hingga Sekarang

FSGI merupakan organisasi guru level nasional yang didirikan pada tanggal 23 Januari 2011. Pendirian organisasi ini bermula dari pertemuan organisasi-organisasi guru daerah di Hotel Bumi Wiyata Depok. Organisasi guru yang hadir dalam pertemuan ini adalah Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), Serikat Guru Indonesia Medan (SeGI Medan), Serikat Guru Tangerang (SGT), Serikat Guru Kota Tangerang (SIGAT), Serikat Guru Serang (Sigat), Serikat Guru Serang (SGS), Serikat Guru Lebak (Segel), Forum Diskusi Guru Pandeglang (FDGP), Serikat Jawa Barat, Serikat Guru Madura, Serikat Guru Bima,

Serikat Guru Sulawesi Selatan dan Aliansi Perjuangan Guru Purwakarta (APG). Dari banyaknya organisasi guru daerah yang hadir, kemudian mereka sepakat untuk membuat sebuah organisasi guru yang anggotanya adalah organisasi-organisasi guru tingkat daerah. Kemudian diumumkan melalui konferensi pers di kantor ICW Kalibata mengenai berdirinya organisasi guru yang diberi nama Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Organisasi-organisasi guru daerah yang hadir dalam rapat pembentukan FSGI karena mempunyai ide dan visi yang sama.

Mereka mempunyai visi untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Bagi mereka, makna pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan ini. Kualitas pendidikan dengan ditopang oleh profesionalisme guru, kualitas sarana dan prasarana, kualitas pelayanan pendidikan, dan kualitas penganggaran. Begitu pula dengan keadilan dalam pendidikan, tidak ada diskriminasi dalam pendidikan, pembangunan pendidikan yang merata, adil dalam masalah kesejahteraan guru, dan adil terhadap siswa. Ketika kualitas dan keadilan dalam pendidikan itu tercapai, maka apa yang dicita-citakan dalam oleh pendidikan Indonesia akan terwujud.

Penggunaan kata Federasi dalam FSGI dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa organisasi ini tergabung dari beberapa organisasi lokal yang mempunyai otonomi sendiri. Keanggotaan Federasi ini bersifat serikat, artinya bukan secara individu atau perorangan, tetapi anggotanya berasal dari serikat-serikat guru yang ada di berbagai daerah. Individu yang ingin bergabung dengan FSGI, harus bergabung atau membuat organisasi serikat guru tingkat lokal yang berbadan hukum terlebih dahulu.

Organisasi guru lokal yang bergabung dengan FSGI memiliki hak otonom dalam menjalankan organisasi tersebut. Mereka tidak diatur oleh FSGI pusat dalam pelaksanaan baik sistem organisasi maupun program kerja atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Hubungan dengan FSGI pusat hanya dalam bentuk diskusi yang dilakukan melalui *group chatting* media sosial dan pertemuan nasional yang diadakan satu tahun atau dua tahun sekali.

Organisasi guru daerah yang terdaftar sebagai anggota FSGI disebut 'SEGI' dengan Presidium sebagai pemimpinya. Terdapat keberagaman fokus yang terbentuk di dalam setiap segi yang tersebar di daerah-daerah ini. Sebagai contoh ialah SEGI Medan yang keberadaannya lebih fokus dalam hal melayani keluhan-keluhan guru setempat dan memberikan advokasi hukum dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendidikan, terutama guru. Hal ini berkaitan dengan latar belakang organisasi yang mendirikan Segi Medan. Menurut penuturan FT bahwa Segi Medan diinisiasikan tahun 2008 oleh LSM SAHDAR (Sentra Advokasi Hak Pendidikan Rakyat). Karena LSM ini aktivitasnya mengarah pada pendidikan dan advokasi terhadap siswa dan guru yang tidak mendapatkan keadilan dalam pendidikan, maka muncul inisiatif untuk mendirikan organisasi guru yang khusus bergerak atas nama guru. Dari latar inilah muncul SEGI Medan dan kemudian bergabung dengan FSGI di tahun pertama, bahkan terlibat dalam membentuk organisasi FSGI seperti yang dibicarakan sebelumnya. Lain pula yang menjadi fokus dari SEGI Bima, yang lebih kerap memfokuskan gerakannya pada upaya pemerataan pendidikan di wilayah timur, kualitas pendidikan dan kesejahteraan bagi guru di Kabupaten Bima. Salah satu upaya mereka dalam pemerataan pendidikan adalah mengadvokasi dan menekan pemerintah untuk memperbaiki sarana dan prasarana SD di Sarampi, Bima. Dikatakan SD ini seperti kadang hewan, karena fasilitas belajarnya jauh dari layak.

Dari kenyataan tersebut, dapat dilihat bahwa adanya otonomi setiap anggota organisasi FSGI. Pada satu sisi, sistem ini memberikan kebebasan terhadap organisasi-organisasi keanggotaan FSGI yang berdampak baik terhadap perkembangan organisasi. Di samping itu dengan sistem federasi ini juga tidak memberikan strata antar anggota yang memungkinkan munculnya proses egaliter dalam tubuh organisasi. Namun, sisi lain justru sistem ini memberikan dampak sebaliknya. Dengan adanya kebebasan dari organisasi pusat, maka organisasi daerah kurang berkembang karena tidak adanya supervisi dari organisasi pusat.

Perubahan Sosial Politik: dari UU Guru & Dosen hingga Gerakan Guru

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa perubahan struktur politik di Indonesia dari struktur politik yang represif – yang terjadi masa Orde Baru – menuju struktur politik yang terbuka – masa Reformasi – memberikan peluang gerakan sosial yang lebih progresif terhadap organisasi-organisasi sosial, termasuk organisasi guru. Gerakan Reformasi menjadikan struktur politik Indonesia menjadi lebih “demokrasi” ketimbang masa Orde Baru. Gerakan Reformasi ini kemudian diiringi dengan perubahan bentuk perundang-undangan menjadi lebih terbuka terhadap gerakan sosial, terutama terhadap gerakan guru. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen merupakan bentuk keterbukaan peluang politik di Indonesia. UU ini pula yang menjadi landasan bagi organisasi-organisasi guru yang lahir pasca Orde Baru. Alasan ini pula yang mendorong lahirnya organisasi FSGI.

Keterkaitan perubahan sosial politik di Indonesia dari sistem politik yang tertutup menjadi sistem politik yang terbuka sehingga memunculkan banyak organisasi progresif ini dapat dilihat dengan *political opportunity structure (POS)* atau struktur peluang politik (Eisinger, 1971). Dalam teori ini, gerakan sosial terjadi ketika adanya peluang dalam struktur politik. Lebih lanjut disebutkan Eisinger (1971) bahwa ada empat hal yang mendasari POS ini yaitu 1) *The nature of the chief executive*, 2) *The mode of aldermanic election*, 3) *The distribution of social skill and status*, dan 4) *The degree of social disintegration*. Poin satu (1) dan dua (2) pada mekanisme tersebut berkaitan dengan struktur, sedangkan poin (3) dan poin (4) berkaitan dengan agen. Keempat poin ini pada dasarnya membicarakan bagaimana keterkaitan antara struktur dan agen. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan di suatu negara diposisikan sebagai struktur dan organisasi gerakan sosial dapat dikatakan sebagai agen. Dengan kata lain, dalam tulisan ini pemerintah dikatakan sebagai struktur, sedangkan FSGI sebagai agen gerakan sosial.

Dalam banyak kasus isu tentang pendidikan, FSGI sebagai organisasi guru lebih banyak melakukan protes terhadap pemerintah. Mereka selalu memberikan kritik sekaligus menawarkan solusi terhadap permasalahan yang dikritiknya. Dalam teori POS, kritik maupun protes yang diberikan oleh FSGI terhadap pemerintah merupakan fungsi dari peluang politik. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Eisinger (1971) bahwa protes merupakan tahapan yang paling rendah sebelum terjadinya gerakan sosial. Seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa ada dua mode fungsi peluang politik, yaitu mode linier dan mode kurvalinier. Dalam mode linier, protes ini dikatakan sebagai bentuk dari respons kefrustrasian (*frustrated response*). Artinya bahwa ketika peluang politik rendah, maka protes akan tinggi, dan sebaliknya ketika peluang politik tinggi maka protes akan menurun. Selain sisi lain, dalam mode kurvalinier, ketika peluang politik tersebut tinggi maka protes juga akan tinggi, sedangkan ketika peluang politik rendah maka protes juga akan rendah. Berdasarkan analisis Eisinger (1971) ini, kita dapat melihat bahwa mode struktur peluang politik di Indonesia adalah mode kurvalinier. Hal ini lantaran gerakan guru semakin progresif ketika adanya struktur politik di Indonesia memasuki era reformasi yang memberikan ruang untuk protes, sedangkan gerakan guru mundur ketika ruang protes tertutup pada pemerintahan Orde Baru.

Lebih lanjut Eisinger (1971) menyatakan bahwa ada empat variabel yang memungkinkan gerakan sosial tersebut muncul. *Pertama*, gerakan sosial muncul ketika akses terhadap lembaga-lembaga politik memiliki hubungan yang terbuka atau tertutup. Artinya bahwa pola hubungan yang terbuka akan membuka kesempatan bagi munculnya gerakan sosial, sedangkan pola hubungan yang tertutup akan menciptakan hambatan bagi gerakan sosial. *Kedua*, gerakan sosial bisa saja muncul ketika struktur politik sedang transisi. Artinya bahwa gerakan sosial akan muncul ketika keadaan struktur politik sedang tidak stabil, sedangkan struktur politik baru belum terbentuk. Keadaan ini akan memberikan peluang untuk terjadinya gerakan sosial. *Ketiga*, adanya konflik besar antar elit politik dan kesempatan ini digunakan oleh agen gerakan sosial sebagai peluang gerakan sosial.

Pola hubungan yang terbuka antara FSGI dengan pemerintah yang membuat gerakan FSGI semakin lancar. Pemerintah membuka pintu kritikan terhadapnya dengan sistem politik

yang demokratis, dan peluang ini digunakan sebaik-baiknya oleh FSGI. Salah satu contoh adanya keterbukaan pemerintah terhadap kritikan FSGI sebagaimana disampaikan oleh SS terkait permasalahan peningkatan kompetensi guru. FSGI mengkritik tentang pola pelatihan yang diberikan oleh pemerintah untuk peningkatan kompetensi guru. Menurut FSGI pola tersebut tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kompetensi guru. Untuk itu FSGI memberikan kritik sekaligus solusi yaitu dengan mengadakan program pelatihan guru dengan skema pelatihan 4B1E atau skema pelatihan berkualitas, bermanfaat, berkelanjutan, berbobot, dan evaluatif.

Pola hubungan yang terbuka antara FSGI dan pemerintah dikatakan McAdam & Snow (1997) sebagai hubungan yang konstituen, atau melayani satu sama lain. Pemerintah Indonesia dengan landasan konstitusi yang demokratis melayani FSGI, sedangkan FSGI melayani pemerintah dengan bentuk kritik dan saran sebagai upaya menciptakan demokratisasi yang utuh. Di sini, dengan adanya pola hubungan yang terbuka antara agen dengan struktur politik, maka kapasitas dan kecenderungan negara untuk melakukan tindakan represif akan semakin berkurang.

Bentuk Gerakan FSGI: dari Advokasi hingga Mobilisasi Massa

Ada banyak bentuk gerakan sosial yang dilakukan oleh FSGI. Namun dalam studi ini akan dikelompokkan dalam empat bentuk gerakan sosial. Keempat bentuk tersebut antara lain memperjuangkan keadilan bagi guru melalui jalur hukum, membentuk opini publik dengan menggunakan media massa sebagai ujung tombak gerakan, pelatihan-pelatihan guru sebagai peningkatan profesionalisme, dan melakukan diskusi rutin untuk memobilisasi massa.

Para guru sering mencap FSGI seperti LSM karena perjuangannya lebih banyak mengadvokasi dan mewujudkan keadilan melalui jalur hukum. Hal ini juga tidak ditepis oleh salah seorang wartawan pendidikan, UB, yang mengatakan bahwa FSGI merupakan organisasi yang sangat kritis terhadap isu pendidikan, serta memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum. Ia sering meliput berita tentang FSGI yang melakukan advokasi.

Perjuangan tentang kesejahteraan guru juga tidak hanya terpusat di FSGI, tetapi juga merebak ke SEGI daerah-daerah. Misalnya SEGI Bima yang mengadvokasi kesejahteraan guru Honorer Daerah (HonDa). Menurut SEGI Bima, guru honorer daerah berdasarkan surat keputusan bupati Bima yang menyatakan gaji guru honor daerah adalah 300 ribu rupiah. Surat keputusan tersebut berlaku dari tahun 2005 hingga sekarang. Artinya, dari tahun 2005 sampai tahun 2019 belum ada perubahan terkait gaji guru honor daerah. Akan tetapi, kebutuhan hidup semakin meningkat, ditambah dengan naiknya inflasi secara nasional menyebabkan gaji guru honor tersebut jauh dari kata sejahtera.

Hampir senada juga dengan perjuangan SEGI Bima, SEGI Medan melakukan advokasi kepada pemerintah melalui lembaga bantuan hukum Medan. Tidak sampai di sini, SEGI Medan kemudian membuat kajian tentang besaran ideal gaji guru honorer. Berlandaskan format peraturan tenaga kerja, SEGI Medan menemui fakta di lapangan bahwa gaji guru honorer dibayar 10 ribu per jam. Jika si guru ini jadwal mengajarnya hanya 24 jam, maka total gajinya hanya berkisar 240 ribu sebulan. Dari temuan ini, SEGI Medan melakukan kajian untuk menuntut pemerintah terkait kesejahteraan guru. Merurutnya, gaji guru dapat dikatakan layak ketika guru mendapatkan gaji minimal dua kali lipat dari UMR. Rasionalnya adalah UMR diperuntukkan bagi buruh yang tamatan SMA ke bawah, sedangkan guru kualifikasinya sudah Sarjana. Kemudian beban kerja guru jauh lebih besar dibanding buruh.

Selain memperjuangkan kesejahteraan guru melalui jalur hukum, FSGI juga melakukan advokasi terhadap guru-guru yang tersangkut masalah hukum. Dalam advokasi masalah hukum ini FSGI sering menggandeng LBH Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Salah satu contoh kasus yang diselesaikan dan dimenangkan oleh FSGI adalah kasus pencopotan salah seorang kepala sekolah oleh Dinas Pendidikan yang tidak berlandaskan

hukum apapun. Permasalahan ini kemudian diselesaikan melalui jalur hukum yang akhirnya dimenangkan oleh FSGI. Dalam proses advokasinya, FSGI menggunakan meja hijau dan meja coklat. Meja hijau melalui jalur hukum, sedangkan meja coklat melalui konferensi pers yang bertujuan untuk menguatkan argumen FSGI secara politis.

Media massa dalam gerakan sosial mempunyai peran penting dalam gerakan sosial yang salah satunya adalah sebagai alat propaganda. Media massa dikatakan sangat efektif dalam propaganda ide maupun gerakan. Lebih jauh lagi, media massa memiliki kekuatan dan memberikan pengaruh persuasif yang masif kepada publik. Hal ini senada dengan Curran & Gurevitch (2005) yang menyatakan bahwa media massa terbukti berpengaruh sebagai *brainwash* selama perang dunia berlangsung dan menjadi mesin efektif bagi penyebaran ideologi fasisme di Eropa selama masa perang. Di Indonesia sendiri, pada masa Soeharto media massa digunakan sebagai alat propaganda pemerintah. Ia dikendalikan oleh pemerintah untuk pencitraan pembangunan pemerintah yang gemilang. Faktanya, media massa masa itu tidak bersifat independen, netral dan objektif terhadap suatu berita (Winarni, 2014).

FSGI sebagai organisasi guru sangat menyadari betul akan fungsinya media massa. Bagi mereka, pemberitaan pers sangat efektif dalam menyampaikan ide dan gagasan. Bahkan FSGI menyadari bahwa tanpa media massa mereka tidak akan besar. Dengan tegas mereka menyatakan bahwa mereka sangat tergantung dengan media massa. Apa pun isu tentang pendidikan, mereka akan selalu menghubungi atau dihubungi oleh media massa. Mereka begitu dekat dengan media massa, dan media massa merupakan alat untuk menyosialisasikan hasil diskusi dan rapat internal FSGI. Lebih lanjut, HP mengatakan bahwa:

“...Jadi selama ini kami melakukan gerakan bersama dengan jaringan dan bersama dengan kekuatan media untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar pemerintah ini dalam pelayanan pendidikan, dalam menciptakan demokrasi pendidikan, dalam menciptakan anggaran pendidikan, harus berkualitas...”

Menggandeng media massa dalam gerakan tidak hanya dilakukan oleh FSGI pusat saja, tetapi SEGI yang ada di daerah-daerah juga menggunakan media massa sebagai ujung tombak gerakan. Misalnya sebut saja SEGI Bima, yang menggunakan media massa sebagai ujung tombak gerakan. SEGI Bima sejak awal bergabungnya dengan FSGI menggunakan media massa untuk mengumumkan ke publik bahwa SEGI Bima bergabung dengan FSGI. EI mengatakan bahwa corak gerakan SEGI Bima dengan FSGI sama-sama menggunakan media massa untuk menyuarakan gerakan sosial yang mereka lakukan. Bagi mereka, media massa menopang segala bentuk gerakannya, dan merekam semua ide beserta gagasannya untuk disampaikan ke publik.

Selain advokasi dan menggunakan media massa, FSGI juga mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme guru sehingga kualitas pendidikan Indonesia akan meningkat. Di lain pihak, pemerintah telah berupaya meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% di tahun 2016 atau sekitar 444 triliun dari total APBN. Dengan anggaran yang sebesar ini, diharapkan kualitas pendidikan semakin baik. Namun faktanya anggaran yang besar tersebut digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan guru PNS. Maka tidak mengherankan jika rata-rata penghasilan guru PNS menjadi lebih meningkat. Namun hal ini menimbulkan masalah baru ketika kesejahteraan yang meningkat tidak diiringi oleh meningkatnya kualitas kompetensi guru akan menjadi masalah. Pada kenyataannya, kualitas pendidikan di Indonesia jauh dari kata “memadai”. Hal ini lantaran hasil UKG guru dengan rata-rata nasional pada tahun 2015 berkisar 40-43, sedangkan pada tahun 2016 berkisar 63-70. Padahal angka ini masih di bawah standar yakni 75. Berdasarkan indeks pembangunan manusia (IPM) dari United Nations Development Programme (UNDP) 2016, Indonesia hanya meraih angka 0,689 dan berada di peringkat ke-113 dari 188 negara.

Permasalahan kompetensi dan profesionalitas guru ini pun menjadi fokus gerakan dari FSGI. FSGI sering mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi anggotanya, tidak untuk guru pada umumnya. Hal ini karena FSGI telah dicap sebagai organisasi yang kerap menentang pemerintah. Pelatihan-pelatihan ini kerap mendapatkan

antipati dari dinas pendidikan dan mereka merasa berat dengan gerakan yang dilakukan oleh FSGI. Selain itu, metode pelatihan yang dilaksanakan oleh FSGI cukup berbeda dengan metode yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika pemerintah memberikan pelatihan secara umum terhadap guru, maka FSGI mempunyai metode 4B1E (berkualitas, bermanfaat, berkelanjutan, berbobot, dan evaluatif). Pelatihan yang berkualitas maksudnya adalah isi dari pelatihan tersebut memberikan makna terhadap para guru. Saat datang ke pelatihan, guru mendapatkan apa yang mereka inginkan dan meningkatkan bagian kompetensi yang dirasa kurang. Metode pelatihan yang diberikan oleh FSGI selanjutnya adalah pelatihan yang berkelanjutan, maksudnya adalah pelatihan yang diberikan tidak hanya berhenti 3 hari atau seminggu, tetapi pelatihan ini dilakukan berkelanjutan dan ber-periodik. Ukuran bobot latihan tersebut bukan pada lamanya pelatihan, tetapi seberapa bermaknanya pelatihan tersebut terhadap guru. Ketika guru datang ke pelatihan, guru menyadari bahwa pelatihan tersebut merupakan yang dibutuhkannya.

Ada beberapa bentuk pelatihan yang telah dilaksanakan oleh FSGI. *Pertama*, pelatihan tentang pengelolaan keberagaman di sekolah. Bentuk pelatihan ini diarahkan kepada kompetensi sosial yang dimiliki oleh guru. Untuk mengadakan pelatihan ini, FSGI bekerja sama dengan SETARA INSTITUTE dan Komnas HAM demi memberikan kebermanfaatan dan kebermaknaan pelatihan tersebut terhadap guru. *Kedua*, ada juga pelatihan tentang transparansi keuangan di sekolah dan transparansi dana pendidikan. Pelatihan ini difokuskan pada bagaimana pendidikan anti korupsi bisa berjalan baik di lingkungan sekolah. Korupsi telah menjadi musuh berbahaya bagi bangsa, bahkan kementerian pendidikan merupakan kementerian yang cukup banyak melakukan korupsi (Kompas.com, 2019). Oleh sebab itu, untuk mengadakan pelatihan ini FSGI bekerja sama dengan ICW untuk melakukan pelatihan tentang transparansi keuangan dan dana pendidikan di sekolah. *Ketiga*, pelatihan tentang pencegahan radikalisme di sekolah. Kegiatan pelatihan ini lebih difokuskan ke daerah-daerah yang menjadi satuan deradikalisasi. Ada beberapa daerah yang menjadi satuan deradikalisasi seperti DKI Jakarta, Kalimantan, dan NTB. Wilayah ini merupakan wilayah yang menjadi jejak-jejak teroris, sehingga deradikalisasi melalui pendidikan sangat penting untuk dilakukan. Pelatihan ini dilakukan oleh FSGI dengan bekerja sama dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Subjek yang dituju dalam pelatihan ini adalah kepala sekolah, karena dalam banyak temuan guru banyak yang terlibat untuk mendukung radikalisme. Keterlibatan tersebut biasanya melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya. Menurut HP, tidak hanya guru dan siswa yang mereka berikan pelatihan, tetapi kepala sekolah yang mempunyai fungsi meminimalisir deradikalisasi di sekolah.

Selain pelatihan yang berkaitan dengan kompetensi sosial guru, juga ada pelatihan tentang kompetensi pedagogis guru. Pelatihan ini berbentuk pelatihan manajemen kelas. Pelatihan ini berbentuk cara-cara melakukan manajemen kelas yang ideal bagi seorang guru. Ketika kelasnya termanajemen dengan baik, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Dengan lancarnya proses pembelajaran di kelas, maka transfer ilmu akan lebih mudah. Ilmu yang diberikan kepada siswa akan diserap dengan maksimal oleh siswa, dan tujuan pendidikan nasional akan mudah terwujud.

Ada beberapa strategi FSGI untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota. *Pertama*, keanggotaan FSGI yang bersifat organisasi, yaitu serikat guru daerah yang telah terdaftar secara hukum. Sistem keanggotaan yang seperti ini akan meningkatkan kuantitas keanggotaan FSGI. Strategi yang kedua, dengan melakukan diskusi rutin pada setiap SEGI. Setiap SEGI di daerah selalu melakukan kajian rutin yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru tentang isu-isu pendidikan yang sedang berkembang. Diskusi rutin ini digunakan sebagai ajang tukar pikiran antar anggota. Diskusi rutin ini juga berlaku bagi FSGI secara nasional. Ketika ada isu pendidikan, FSGI langsung mengadakan musyawarah nasional melalui media sosial, seperti grup *Whats App* dan *google drive*. Hal ini sebagaimana dikatakan HP bahwa:

“Penggunaan grup WA itu, google drive, untuk jarak jauh kami dalam membuat rilis, memudahkan kami dalam efisiensi waktu tidak memungkinkan kami harus bertemu untuk memutuskan sesuatu. Dunia maya ini sudah membantu untuk akses ini membuat kami melakukan gerakan semakin cepat.”

FSGI Sebagai Gerakan Sumber Daya

Dalam kerangka teoritis, gerakan sosial yang dilakukan oleh FSGI dapat dikatakan sebagai gerakan sumber daya (*resource mobilization*). Asumsi dari perspektif ini adalah ketidakpuasan bukanlah hal satu-satunya yang menyebabkan gerakan muncul, tetapi kemampuan agen gerakan sosial dalam memobilisasi sumber daya yang ada untuk merespons masalah sosial. Hal ini senada dengan McCharty & Zald (1977) yang mengatakan bahwa organisasi gerakan sosial memberikan struktur mobilisasi yang sangat krusial bagi aksi kolektif dalam bentuk apa pun. Artinya, bukan ketidakpuasan yang menjadi faktor utama gerakan sosial muncul, tetapi pengorganisasian untuk menciptakan sumber daya dan struktur mobilisasi sebagai bentuk aksi kolektif. Dengan kata lain, aksi kolektif ini sebagai cara atau sarana mencapai tujuan. Ketika asumsi dari teori gerakan sumber daya ini dikaitkan dengan FSGI, maka kita dapat melihat bahwa FSGI sebagai organisasi profesi yang digunakan sebagai sarana dalam pencapaian tujuan.

Dengan adanya kesamaan idealisme ini, maka para anggota FSGI menggunakan organisasi sebagai konstruksi dan rekonstruksi keyakinan-keyakinan kolektif, mentransformasikan ketidakpuasan dan isu-isu tentang pendidikan dalam bentuk aksi kolektif, dan mempertahankan komitmen terhadap gerakan. Menurut Klandermans (2005), gerakan sosial dalam sudut pandang gerakan sumber daya akan muncul sebagai konsekuensi dari bersatunya para aktor dalam cara yang rasional, mengikuti segala kepentingan mereka, dan adanya peran sentral organisasi untuk memobilisasi sumber daya yang ada pada mereka. Lebih lanjut menurut Klandermans (2005), sumber daya dalam teori gerakan sumber daya ini terbagi menjadi dua yaitu sumber daya material dan non-material. *Pertama*, sebagai sumber daya material erat kaitannya dengan uang dan pendanaan dalam sebuah organisasi gerakan. Bagi FSGI sendiri, mereka mendapat sumber dana melalui beberapa cara, yaitu iuran anggota, proposal dari pemerintah, hibah dari institusi lain, dan lain-lain. Menurut penuturan SS bahwa FSGI juga memungut uang kas dari para anggota, donasi yang tidak berikat, serta mengajukan proposal kepada Kementerian untuk kegiatan pelatihan guru. Dengan tegas, ia mengatakan bahwa segala bentuk dana yang diberikan kepada FSGI oleh institusi lain yang syaratnya hanya satu, yaitu hibah tersebut tidak berikat. Artinya, ke depannya FSGI tidak ada intervensi dari lembaga atau institusi lain. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh EI, bahwa SEGI Bima tidak mau diintervensi oleh lembaga pemerintah atau institusi lain. Berdasarkan hal ini, dapat kita simpulkan bahwa SEGI Bima tidak mau menerima bantuan dari institusi mana pun jika bantuan tersebut mengikat dan mengintervensi organisasi. Kemandirian organisasi dan loyalitas para anggota yang membuat gerakan ini semakin masif. Selain itu, SEGI Bima jika ingin bekerja sama dengan institusi lain, mereka ingin kerja sama dengan bantuan bukan berupa uang, misalnya buku dan sebagainya. Seperti yang dikatakan EI sebelumnya bahwa mereka bekerja sama dengan salah satu penerbit untuk pelatihan-pelatihan guru, dan yang didapatkan oleh gurunya berupa buku. Karena menurutnya, buku jauh lebih besar manfaatnya ketimbang memberikan uang.

Kedua, sebagai sumber daya non-material yang berkaitan dengan jaringan sosial atau modal sosial (*social capital*). Bekert (2009) menjelaskan bahwa ada tiga komponen yang saling berinterelasi untuk menciptakan perubahan dalam sebuah arena (*fields*) dalam kerangka konsep modal sosial. Ketiga komponen tersebut adalah institusi, jaringan sosial dan *cognitive frame*. Dalam kerangka ini, institusi diartikan sebagai aturan, norma, dan nilai yang mengikat setiap aktor dalam arena. Lain pula dengan jaringan sosial yang diartikan sebagai pasar tempat terjadi transaksi antar aktor. Di pasar inilah terdapat sumber daya, kekuasaan, pengaruh, dan bukan dominasi dari satu aktor. Kemudian *cognitive frame* diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh aktor dalam melakukan suatu yang ingin mereka capai dalam arena tersebut. *Cognitive frame* ini dapat berupa orientasi pada nilai yang ingin diperjuangkan, bisa itu berupa nilai ekonomi, nilai budaya, dan sebagainya.

Konsep Beckert ini sejalan dengan apa yang terjadi dengan jaringan sosial dalam FSGI. Pertama, komponen *institutions*. Di atas telah dijelaskan bahwa *institutions* berkaitan dengan aturan yang mengikat setiap aktor di dalamnya. Pada organisasi FSGI, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai landasan yuridis berdirinya organisasi ini. Artinya bahwa antara FSGI, pemerintah, dan jaringan non-pemerintah akan terikat oleh aturan ini. Pemerintah tidak akan

mencekal organisasi dan akan bertindak sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang tersebut. Hal ini sesuai dengan penuturan HP, bahwa pemerintah berperan sebagai partner strategis dari FSGI.

Komponen selanjutnya adalah jaringan sosial, yang di dalamnya terdapat sumber daya, kekuasaan, pengaruh, bahkan dominasi dari suatu aktor. Pada FSGI ini, sebaran jaringannya mencakup pada NGO, pemerintah, dan masyarakat sipil penggiat pendidikan humanis. Ada banyak NGO yang bekerja sama dengan FSGI, antara lain ICW, SETARA Institute, LBH Jakarta, media-media massa dan lain-lain. Sebaran jaringan ke pemerintah mencakup Komnas HAM, Dinas Pendidikan, dan kementerian pendidikan. Kemudian dari masyarakat sipil dan penggiat pendidikan, sebut saja Lodewijk F. Paat, Jimmy Paat, Bambang Wisudo dari Sekolah Tanpa Batas, dan Arif Faisal dari Lembaga Bantuan Hukum Sahdar Medan. Jaringan-jaringan yang dimiliki oleh FSGI mempunyai kontribusi yang berbeda-beda pula. Media massa berkontribusi lebih banyak pada pemberitaan ide-ide dan gagasan yang dimiliki oleh FSGI. Selain itu ICW dan Setara Institute berkontribusi lebih banyak pada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh FSGI. FSGI bekerja sama dengan LSM tersebut guna meningkatkan kompetensi sosial yang dimiliki guru. Di lain pihak, LBH berkontribusi dalam proses advokasi-advokasi guru dalam perjuangan dari sudut pandang hukum. Lain pula jaringannya dengan lembaga pemerintah.

Selain komponen institusi dan jaringan sosial, komponen *cognitive frame* juga mempunyai peran bagi FSGI. Menurut peneliti, bagi FSGI komponen inilah yang mempunyai peran besar dalam menciptakan jaringan sosial. Seperti yang dikatakan Beckert (2009), *cognitive frame* berkaitan dengan orientasi nilai yang diperjuangkan. Pada FSGI, orientasi nilai yang mereka perjuangkan mengarah pada orientasi sosial-budaya. Artinya, mereka memperjuangkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Simpulan

FSGI menjadi salah satu organisasi guru yang memperjuangkan dua isu utama dalam pendidikan Indonesia, yaitu memperjuangkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Struktur peluang politik yang terbuka di sini adalah kebebasan melakukan organisasi dan gerakan sosial yang telah terjamin oleh undang-undang dan konstitusi. Peluang ini dimanfaatkan oleh aktor-aktor penggerak FSGI dengan sangat baik dalam mempertegas kekuatan hukum organisasi. Selain itu, para aktor gerakan tersebut merasa aman secara psikologis dalam melakukan gerakan karena telah memiliki payung hukum yang kuat. Sebaran jaringan yang luas mendukung FSGI dalam menjalankan setiap bentuk gerakan, mulai dari advokasi hukum hingga menyampaikan suara melalui media massa yang berskala nasional.

Daftar Pustaka

- Bacevich, & Andrew, J. (2005). *The New American Militarism*. USA: Oxford University Press.
- Beckert, J. (2009). How Do Fields Change? The interrelation of institutions, networks, and cognition in the dynamics of market. *Organization Studies*, 605-627.
- Coomer, M., Jackson, R., & Dagli, C. (2018). Engaging Teachers As Social Justice Actors. *Equity Dispatch*, 1-6.
- Creswell, J. (2002). *Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed method approach; Second edition*. London: Sage Publication.
- Curran, J., & Gurevitch, M. (2005). *Mass Media and Society*. London: Sage Pub.
- Eisinger, P. (1971). Protest Behavior and the Integration Political System. *The Journal of Politics*, 980-1007. Farisi, M. (2013). Dinamika Organisasi Profesional Kependidikan Di Indonesia. *journal unnes*, 36-45.

- Finger, L., & Gindin, J. (2015). From proposal to policy: Social movements and teachers' unions in Latin America. *Springer*, 365-378.
- Halcli, A. (2000). Social Movements. Dalam G. Browning, *Understanding Contemporary Society: Theories of The Present* (hal. 50-72). New Delhi: Sage Publication.
- Henawanto, A. (2014). Persepsi Guru terhadap Persatuan Guru Republik Indonesia dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 1-6.
- Hidayat, R. (2011). Dinamika Sosial Gerakan Guru di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 17, 355-362.
- Hsiao, H.-H. (2008). *Asian New Democracies: The Philippines, South Korea and Taiwan Compared*. Taipei, Taiwan: Taiwan Foundation for Democracy.
- Jenkins, J. (1983). Resource Mobilization Theory and The Study of Social Movements. *Annual Review of Sociology*, 527-553.
- Kaur, B. (2012). Equity and social justice in teaching and teacher education. *Teaching and Teacher Education*, 485-492.
- Kitschelt, H. (1986). Political opportunity structures and political protest: anti-nuclear movements in four democracies. *British Journal of Political Science*, 57-85.
- Klandermans, B. (1997). *The Social Psychology of Protest*. Oxford: Blackwell Publishers.
- _____. (2005). *Protest dalam Kajian Psikologi Sosial*. (H. Soetjpto, Penerj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Klandermans, P, & Stekelenburg, J. (2009). *Social movement theory: Past, present and prospect*. Amsterdam:
- Lemus, M. (2015 Vol. 42, No. 3/4 (142)). The Mexican Teachers' Movement: Thirty Years of Struggle for Union Democracy and the Defense of Public Education. *Social Justice*, 104-117.
- Lund, D. (2001). *Social Justice Pedagogy And Teacher-Student Activism: A Collaborative Study Of School- Based Projects*. Columbia: A Thesis The University Of British Columbia.
- Malaka, T. (2000). *Aksi Massa*. Jakarta: Teplok Press.
- Maran, R. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Matthews, S. (2015). Privilege, Solidarity and Social Justice Struggles in South Africa. *Progressive Journals*, 1-19.
- McAdam, D., & Snow, D. (1997). *Social Movements*. New Jersey: Roxbury Pub.
- McCarthy, J., & Zald, M. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *The American Journal of Sociology*, 1212-1241.
- Meyer, D. (2004). Protest and Political Opportunities. *Annual Review Sociology*, 125-145.
- Namara, R., & Kasaija, J. (2016). Teachers' Protest Movements and Prospects for Teachers Improved Welfare in Uganda. *Journal of Education and Training Studies*, 149-159.
- Picower, B. (2012). Teacher Activism: Enacting a Vision for Social Justice. *Equity & Excellence In Education*, 561-574.
- Porta, D., & Diani, M. (2006). *Social movements : an introduction*. Australia: Blackwell Publishing Ltd.
- Rizali, A., Sidi, I., & Dharma, S. (2009). *Dari Guru Konvensional Menuju Guru Profesional*. Jakarta: Grasindo.
- Rottmann, C. (2013). Social Justice Teacher Activism A Key to Union Vitality. *FALL Journals*, 73-81.

- Salim, S. (2013). *Guru Menggugat!*. Jakarta: Indie Publishing
- Scipes, K. (2014). Social Movement Unionism or Social Justice Unionism? Disentangling Theoretical Confusion within the Global Labor Movement. *Class, Race and Corporate Power*, Article 9.
- Supriadi, D. (2003). *Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan, dan Perjuangannya Sejak Jaman Kolonial Hingga Era Reformasi*. Jakarta: Depdikbud.
- Sutamto, D. (1992). *Dwidjosewojo 1867-1943 Tokoh Pergerakan Nasional Pendiri Bumiputera 1912*. Jakarta: Bumiputera.
- Synott, J. (2001). Development, Education and the Teachers Union Movement in South Korea, 1989-1999. *Australian Journal of Politics and History*, 130-148.
- _____. (2002). *Teacher Unions, Social Movements and the Politics of Education in Asia: South Korea, Taiwan and the Philippines*. Ashgate, England: Routledge.
- _____. (2002). The Teachers' Movement Struggle for a Peace Model of Reunification Education in South Korea. *Social Alternatives*, 42-48.
- _____. (2007). The Korean Teachers and Educational Workers Union: Collective Rights as the Agency of Social Change. *International Electronic Journal for Leadership in Learning*, 13-24.
- Tarrow, S. (1998). *Power in movement: social movements and contentious politics-- 3rd ed.* New Delhi: Chicago University Press.
- Tilaar, H. (1995). *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta: Grasindo.
- Toloudis, N. (2008). Instituteur Identities: Explaining the Nineteenth Century French Teachers' Movement. *Social Movement Studies*, 61-76.
- Wilson, C., & Johnson, L. (2015). Black Educational Activism for Community Empowerment: International Leadership Perspectives. *International Journal of Multicultural Education*, 102-120.
- Winarni, L. (2014). Media Massa dan Isu Radikalisme Islam. *Jurnal Komunikasi Massa*, 159-166.